

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Berkembangnya kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan masa depan dunia membuka peluang besar bagi ekspor hasil perikanan. Selain itu terbukanya pangsa pasar ekspor bagi komoditi hasil perikanan akan memberikan peluang untuk perkembangan usaha perikanan.

Pada era globalisasi sekarang ini hampir dapat dipastikan bahwa sebuah negara tidak akan mungkin sanggup memenuhi kebutuhan dalam negerinya tanpa peran serta negara lain, sehingga nilai strategis ekspor-impor sangat mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian suatu negara.

Indonesia yang merupakan negara agraris yang terletak di poros khatulistiwa mempunyai sumber daya alam yang strategis yang tidak dimiliki oleh negara lain karena hanya mempunyai dua musim yang menjadikan wilayahnya sebagai lingkungan tropis dan keanekaragaman sumber daya alamnya terbesar di dunia setelah Brazilia, oleh karena itu ekspor Indonesia sebagian besar menitik beratkan pada sektor yang berbasis pada sumber daya alam termasuk sektor migas sedangkan impor Indonesia sebagian besar adalah alat-alat produksi dan bentuk alih-alih teknologi¹.

Indonesia yang merupakan negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia mengandung aset yang besar dimana tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing, kegiatan ekspor yang saat ini cenderung turun naik

¹ Gilarso, *Pembangunan Nasional*, BPPE, Sanata Dharma. Penerbit: Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal 72

frekuensinya, membuktikan kalau pasar Indonesia sedang berkembang dan akan menuju ke arah kemajuan. Bahkan untuk bidang impor, trennya telah bergeser dari aktivitas barang jadi untuk digunakan di Indonesia, menjadi impor bahan mentah atau setengah jadi untuk dimanufaktur dan diekspor kembali sebagai barang jadi. Hal ini tentu berdampak positif bagi peningkatan devisa ekspor Indonesia yang memang sedang giat-giatnya digalakkan kegiatan ekspor untuk peningkatan perekonomian.

Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang ditandai dengan disahkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat daerah yang adil dan makmur dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata memberikan dampak yang cukup dirasakan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, setiap Propinsi memiliki kewenangan mengelola perairan lautnya sejauh empat mil atau setara tujuh kilometer dari garis pantai. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pengembangan sektor perikanan menjadi primadona dan hal ini yang kemudian diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah untuk membangkitkan semangat nelayan-nelayan lokal dan pengusaha.

Dinas kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang juga merupakan salah satu instansi pemerintah turut serta berperan dalam meningkatkan kegiatan ekspor khususnya di Kalimantan Tengah, juga telah mengeluarkan berbagai program maupun kebijakan yang intinya dapat mempermudah sekaligus memperlancar arus barang ekspor di bidang kelautan dan perikanan Kalimantan

Tengah. Kebijakan serta program-program yang menjadi landasan strategi dalam rangka memajukan kegiatan ekspor di bidang kelautan dan perikanan kemudian menjadi tema yang menarik untuk dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari dinamika khasanah sosial politik yang berkompeten dengan fenomena hubungan internasional.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengetahui (Membuktikan Hipotesa) tentang bagaimana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan di Propinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung majunya kegiatan ekspor bidang perikanan.
2. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang strategi pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Mendalami ilmu yang selama ini telah didapatkan, yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pembaca.
4. Sebagai peryaratan sebagai mahasiswa dalam rangka untuk memperoleh gelar kesarjanaan SI.

C. Latar Belakang Masalah

Propinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu propinsi yang paling berpotensi di Indonesia. Selain memiliki wilayah daratan yang luas, Kalimantan Tengah juga memiliki wilayah lautan yang luas dengan garis pantai sebesar 750 km. Propinsi Kalimantan Tengah merupakan propinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua. Dari luas daratan yang mencapai 15.798.359 ha, hanya 1.760.079 ha yang menjadi kawasan hutan lindung.

Selebihnya, seluas 14.038.279 ha merupakan kawasan budidaya. Selain tanahnya yang terkenal subur, sebagian besar wilayahnya berada pada dataran rendah. Dari wilayah yang sedemikian luas, 91,69 persen berada pada ketinggian 0-500 m di atas permukaan laut, atau hanya 8,31 persen atau 1.278.391 ha yang berada di atas 500 meter diatas permukaan laut (dpl).

Topografi sedemikian sudah barang tentu merupakan wilayah yang ideal bagi pengembangan pertanian, baik berskala kecil maupun besar. Oleh karena itu, wilayah Kalimantan Tengah, sangat cocok sebagai wilayah pengembangan berbagai komoditi, mulai dari tanaman padi, palawija, hortikultura, hingga perkebunan berskala besar. Potensi ini semakin didukung dengan hidrologi yang baik. Kalimantan Tengah memiliki iklim tropis yang lembab, serta curah hujan sebanyak 120 hari dalam setahun dengan ketinggian 2.732 mm.

Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 153.800 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2002 1.834.365 jiwa, dan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,78 jiwa dengan mata pencaharian mayoritas di

sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, dalam rangka peningkatan gizi masyarakat, pengembangan wilayah serta peningkatan devisa.

Pasca pelaksanaan otonomi daerah dengan disahkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah lebih fleksibel dalam mengatur kinerja tentang pemerintahan daerah, yang menghasilkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta menimbang keuangan pemerintah pusat dan daerah, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Sedangkan sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang diperlukan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Walaupun dinilai oleh beberapa pihak daerah otonomi daerah belum tepat untuk diterapkan karena dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 pasca diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah yang intinya menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah, dinilai beberapa pihak kurang adil dan dapat memicu disintegrasi bangsa karena pada daerah yang

sumber dayanya melimpah akan mendapatkan keuntungan yang maksimal juga dan sebaliknya untuk daerah yang minim sumber dayanya akan mengalami stagnasi pada sektor keuangannya².

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kalimantan Tengah memiliki kewenangan masalah pengelolaan perairan laut, yaitu mengelola sejauh 0-4 mil atau setara tujuh kilometer dari garis pantai serta kewenangan tentang masalah perizinan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000. Masalah perizinan diberi kewenangan kepada kabupaten.

Ekspor perikanan di Kalimantan Tengah juga turut terpengaruh dengan adanya Otonomi Daerah. Menurut Bapak Yohannes H. Mantir³ – kabag bidang usaha tani dinas kelautan dan perikanan – kegiatan ekspor bidang perikanan di Kalimantan Tengah memang masih minim dan terkadang juga nelayan ataupun pengusaha lokal cenderung berdiri sendiri serta lebih memilih mengirimkan komoditas ekspornya dari luar Kalimantan Tengah hal ini kemudian menyebabkan kegiatan ekspor tersebut tidak tercatat di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka terjadi perubahan dalam hal pemberian kewenangan izin usaha perikanan (IUP) seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000 BAB II tentang Wewenang dan tata cara pemberian izin usaha perikanan Pasal 3, wewenang izin usaha perikanan ini dapat dipegang langsung oleh tiap-tiap kabupaten dan

² Saryadi, Soegeng. *Otonomi daerah Masa Depan Indonesia*. Penerbit: Centre Of Politic Studies, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.

³ Hasil wawancara di dinas kelautan dan perikanan propinsi Kalimantan Tengah, Senin 13 November 2006

tentunya melalui dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada kabupaten, maka diharapkan kepada nelayan ataupun eksportir menjadi lebih bersemangat dalam memajukan kegiatan ekspor bidang perikanan. Adapun komoditi hasil perikanan yang dijadikan unggulan ekspor antara lain udang beku, udang segar, ikan betutu, labi-labi, ikan hias botia. Sampai saat ini hanya ada 1 (satu) pengusaha yaitu PT. Ujung Timur di Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki *cold storage* untuk melakukan proses pengolahan udang beku untuk diekspor ke manca negara. Perusahaan ini juga rutin memberikan laporan ekspornya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah. Dengan melihat dari kesempatan yang ada di Era Otonomi ini serta potensi perikanan yang dimiliki oleh wilayah Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah selalu berupaya semaksimal mungkin menarik masyarakat maupun pengusaha untuk ikut menggalakkan kegiatan ekspor bidang perikanan.

D. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang terdapat dalam perumusan skripsi ini adalah:

“Bagaimana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi tantangan dan kesempatan ekspor bidang perikanan di era Otonomi Daerah?”

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mencoba menganalisis perumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori :

1. Pembuatan keputusan (*Decision-Making*), adalah⁴:

"Simply the act of choosing among available alternatives about which uncertainty exists"
(sekedar tindakan memilih alternatif yang tersedia yang di situ terdapat ketidakpastian).

Teori *decision-making* mengarahkan perhatiannya secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi yang luas yang disebut "eksekutif". Melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah. Sebagaimana Richard Snyder, H.W.Brusk, dan Burton Sapin mengatakannya :

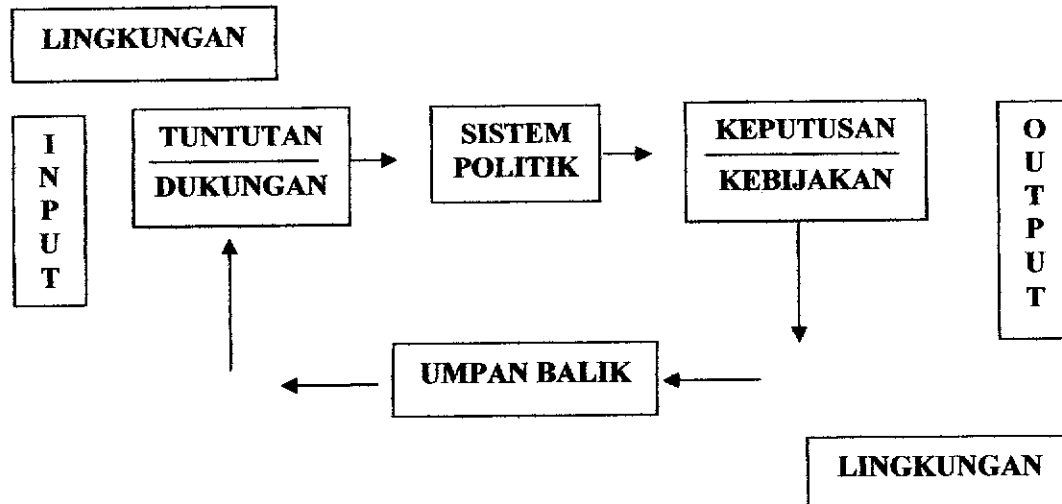
"merupakan salah satu dari pilihan-pilihan metodologis pokok kita untuk menetapkan batasan negara pada para pembuat keputusannya – yaitu mereka yang tindakan otoratinya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara."

Dengan mempersempit obyek penelitian dari sebuah kolektivitas yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil yaitu orang yang bertanggungjawab atas keputusan-keputusan. Untuk memperjelas proses pembuatan keputusan ini maka penulis menggunakan konsep sistem politik (*political system*).

⁴ M. Amien Rais, Harwanto Dahlan, dan Tulus Warsito. *Teori-teori Hubungan Internasional : edisi terjemahan*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY, 1996, hal 225

Gambar 1.1

Diagram Sistem Politik



Sumber : Mohtar Mas'ood⁵

Input yang merupakan keberadaan lingkungan yang menyangkut Potensi baik itu Sumber Daya Alam khususnya dalam hal ini Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serta luas daratan propinsi ini yang cukup luas sehingga dimungkinkan bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan, maupun Sumber Daya Manusia Propinsi Kalimantan Tengah, faktor lainnya yang dapat menjadi penyebab keinginan untuk berkembang bagi Propinsi Kalimantan Tengah juga didapat dengan melihat Propinsi tetangga contohnya Propinsi Kalimantan Timur yang kemudian menjadikan sebagai motivasi bagi propinsi Kalimantan Tengah paling tidak dapat menyamakan dalam hal kemajuan pembangunannya, rasa keinginan ini dapat dikatakan sebagai tuntutan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh Propinsi Ini khususnya yang menyangkut dalam hal kegiatan ekspor bidang perikanan. Tuntutan ini kemudian mempengaruhi sistem politik yang sedang

⁵ Mohtar Mas'ood, Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Penerbit: Gajah Mada University Press.1993, hal 31

berjalan di Kalteng yang kemudian menjadi penyebab munculnya keputusan serta kebijakan, keputusan maupun kebijakan ini secara langsung maupun tidak langsung akan diterima masyarakat ataupun tergantung nantinya untuk siapa Keputusan atau Kebijakan tersebut dibuat dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas kelautan dan perikanan mengeluarkan kebijakan tentang perizinan usaha perikanan serta kebijakan tentang kewenangan mengelola perairan lautnya sejauh empat mil atau setara tujuh kilometer dari garis pantai. Sedangkan outputnya penulis menjelaskan sebagai hasil yaitu keberadaan dinas kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah dalam melakukan kegiatannya yaitu pengawasan dan pengendalian mutu komoditas perikanan serta pemberdayaan diharapkan dapat memajukan kegiatan ekspor perikanan, yang kemudian berdampak pada kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk pada umumnya serta khususnya kepada nelayan-nelayan dan eksportir, yang akhirnya akan menimbulkan output yang dalam hal ini berupa dampak atau pengaruh. Dalam penelitian ini inputnya berupa dukungan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh propinsi Kalimantan Tengah. Sehingga kemudian

2. Selain menggunakan teori *Pembuatan Keputusan*, penulis juga akan menggunakan **teori perdagangan internasional**.

Sebelum lebih lanjut menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan teori Perdagangan Internasional, Penulis ingin sedikit menjelaskan tentang Strategi, karena menyangkut hubungannya dengan perdagangan Internasional. Yang dimaksud dengan Strategi adalah pola fundamental dari tujuan-tujuan

sekarang dan terencana, penyebaran sumber daya dan interaksi dari sebuah perusahaan dengan pasar pesaing dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Strategi haruslah menentukan apa yang akan dicapai, dimana (pada industri apa dan pasar produk apa) yang akan menjadi fokus perusahaan dan juga bagaimana upaya pengalokasian aktifitas dan sumber daya untuk setiap pasar produk guna memenuhi peluang lingkungan dalam maupun luar negeri serta ancaman untuk meraih suatu keunggulan kompetitif⁶. Karena masing-masing negara memiliki keunggulannya masing-masing, maka dalam hal perdagangan internasional seperti dalam hal kegiatan ekspor diperlukan adanya suatu strategi yang tepat.

Perdagangan internasional adalah perdagangan dengan pihak asing. Suatu gagasan yang sudah ada sejak dahulu. Karena orang hidup di negara-negara berdaulat, mereka disosialisasikan untuk meyakini keunggulannya.⁷

Perdagangan internasional merupakan kegiatan internasional yang paling tidak mencerminkan interdependensi antar negara, tanpa banyak menghiraukan perbedaan politik diantara mereka. Interdependensi di lingkungan perdagangan jauh dari hanya sekedar pertukaran barang dan jasa karena adanya sejumlah unit yang diperdagangkan bila pihak-pihak yang terkait menyepakati nilai relatif dari kedua komoditi tersebut. Dengan tidak adanya spesialisasi penuh dari suatu barang yang diperdagangkan maka akan mengubah jumlah barang yang diproduksi suatu negara.

Perdagangan internasional dilakukan antara unit-unit politik setiap negara melakukan pengawasan dari perdagangan internasional tersebut dengan cara yang

⁶ Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional* Jilid I, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal 382

⁷ Robert A. Isaak, *Ekonomi Politik Internasional*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal 99.

bervariasi. Setiap negara mempunyai aturan-aturan perdagangan yang berbeda-beda⁸.

Dengan adanya aturan-aturan serta kebijakan perdagangan yang dimiliki setiap negara maka perusahaan harus berusaha untuk menetapkan strategi dalam memasarkan produknya. Dengan dijelaskan bagaimana cara perusahaan memasuki pasar internasional, dan cara mereka dalam menambah volume ekspor serta menambah jumlah produksi dan menaikkan hasil penjualan. Para pengusaha bersaing dalam menerapkan cara yang berbeda-beda. Dengan upaya yang tepat maka input yang didapat akan bertambah. Oleh karena itu sebelum memasuki pasar internasional pengusaha harus bisa melihat kondisi pasar yang hendak dimasukinya dengan baik agar hasil produksinya membawa keuntungan.

Hal ini yang kemudian menjadikan sebagai motivasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah dalam melihat tantangan dan kesempatan ekspor yang terdapat di Propinsi ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah juga mengikuti prosedur serta strategi perdagangan internasional, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. KEP.21/MEN/2004 yang merupakan prasyarat tentang Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Untuk Pasar Uni Eropa, jadi bagi para pengusaha yang berniat mengirimkan komoditasnya ke pasar Uni Eropa tersebut terlebih dahulu harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan tersebut.

⁸ Muzamil Zamahsari, *Pemasaran Internasional*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hal. 233

Strategi-strategi lainnya yang dipakai Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan tengah yaitu melakukan promosi, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asing, pengelolaan SDM, peningkatan penggunaan teknologi. Dalam hal ini upaya yang digunakan perusahaan harus tepat untuk memasarkan hasil produksinya karena harus melewati seperangkat aturan-aturan yang dimiliki oleh negara yang hendak dituju.

F. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi tantangan dan kesempatan ekspor bidang perikanan di era Otonomi Daerah dengan:

- a. Pengembangan Wilayah Strategis Perikanan
- b. Mengoptimalkan penggunaan sistem pemasaran antara lain melakukan promosi dengan mengikuti pameran-pameran perikanan berskala internasional
- c. Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka dapat tercipta suatu kemajuan dan pemerataan daerah yang menjadi pilar penopang bagi pembangunan nasional, sehingga bagi Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah akan dapat mengambil hasil secara maksimal tanpa harus tersedot ke pusat, tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan

Tengah khususnya dalam memajukan kegiatan ekspor bidang perikanan adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai modal pembangunan daerah dan menghasilkan devisa bagi negara, karena dengan melalui ekspor maka daerah akan lebih mampu dalam mendapatkan profit sebagai modal pembangunan daerah yang juga menjadi pilar pembangunan nasional.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan Data Primer, yaitu dengan secara langsung penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, serta semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan para eksportir yang terlibat di bidang perikanan Kalimantan Tengah, selain itu penulis menggunakan teknik pengumpulan Data Sekunder, yaitu menggunakan sumber data kepustakaan (*Library Research*). Selain itu juga menggunakan media cetak dan internet (*Web Site*).

H. Jangkauan Penulisan

Jangkauan pada penulisan skripsi ini adalah pada awal disahkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999, yang secara kebetulan bersamaan dengan dimulainya masa percobaan penerapan Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah sampai dengan sekitar Tahun 2004, ketika masa percobaan

Undang-undang mengenai Otonomi Daerah selesai. Jangkauan penulisan di luar waktu tersebut sedikit disinggung apabila masih ada keterkaitan dan relevan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Teknik Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang dinamika Propinsi Kalimantan Tengah yang mencakup berbagai potensi macam potensi, keunggulan dan faktor penunjang yang dapat memajukan Propinsi ini, berbagai macam kendala dan hambatan yang dialami oleh daerah Kalimantan Tengah khususnya yang berhubungan dengan bidang kelautan dan perikanan.

BAB III berisi tentang dampak positif dan negatif pelaksanaan otonomi daerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam hubungannya dengan ekspor beserta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung.

BAB IV membahas Strategi yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah dalam upayanya memajukan kegiatan ekspor perikanan melalui pengembangan wilayah strategis perikanan meningkatkan pengawasan, pengendalian mutu serta konservasi sumber daya perikanan serta mengikuti pameran bidang kelautan dan perikanan sebagai sarana promosi menarik investasi asing.

BAB V Kesimpulan dan Penutup